

PERILAKU NON-VOTING
DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH
KOTA PADANG
PERIODE 2008 - 2013
(Studi Kasus di Kecamatan Koto Tengah)



Oleh :

AINA
NIM 10705

**Ditulis untuk memenuhi sebagian persyaratan
dalam mendapatkan gelar Magister Pendidikan**

PROGRAM STUDI ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
KONSENTRASI PENDIDIKAN SEJARAH/PPKN

PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2012

ABSTRACT

Aina. 2012. Non-voting behavior in Local Head Election of Padang for the Period of 2008-2013 (A Case Study in Subdistrict of Koto Tengah).

The directly local head election aims to elect the more credible local heads in accordance with the wishes of the people, so that it has higher level legitimacy. But in reality, the presense of the people (voters) at the time of voting (voting turn out) was not high in local head election of Padang period of 2008-2013. Voters who do not use their voting rights in context showed the highest rate in the subdistrict of Koto Tengah that is equal to 42.51%. This study seeks to reveal how the non-voting behavior is and what are the causes of the behavior in the context of the subdistrict of Koto Tengah.

This is a descriptive-qualitative study where selected based on snowball sampling of voters who vote in local head election of Padang for the period Of 2008-2013. The sample consist of 20 people with the different social backgrounds. Data obtained by using in-depth interviews technique and documentation study. Furthermore, the data obtained were validated through a member check method and triangulation of sources. Then the data were analyzed through a qualitative method.

The result of study showed that there are two forms of non-voting behavior existed in the local head election of Mayor and Deputy Mayor of Padang for the period 2008-2013 in the subdistrict of Koto Tengah, namely : (1) does not come to the polling station ; (2) factor of the political system ; (3) factor of political trust ; and (4) factor of socioeconomics status.

ABSTRAK

AINA. 2012. Perilaku Non-voting dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Padang Periode 2008 – 2013 (Studi Kasus di Kecamatan Koto Tangah).

Pemilihan kepala daerah secara langsung bertujuan agar kepala daerah terpilih lebih kredibel dan sesuai dengan keinginan masyarakat, sehingga tingkat legitimasinya lebih tinggi. Kenyataan menunjukkan tingkat kehadiran masyarakat pada saat pemungutan suara (*voting turn out*) tidak tinggi. Kecamatan Koto Tangah merupakan kecamatan di Kota Padang yang memiliki angka tertinggi dari jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya (golongan putih = golput) yaitu 42,51% dalam pemilihan kepala daerah Kota Padang Periode 2008 – 2013. Oleh karena itu penelitian ini berupaya mengungkapkan bagaimana bentuk perilaku non-voting dan penyebab terjadinya hal tersebut di Kecamatan Koto Tangah.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dimana informan penelitian dipilih berdasarkan *snowball sampling* yaitu pemilih yang golput dalam pemilihan kepala daerah Kota Padang periode 2008 – 2013 sejumlah 20 orang dengan berbagai latar belakang sosial. Data diperoleh dengan menggunakan teknik wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Selanjutnya data yang diperoleh keabsahannya diuji melalui *member check* dan triangulasi sumber. Sementara itu analisis data dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua bentuk perilaku non-voting dalam pemilu kepala daerah Walikota dan Wakil Walikota Padang Periode 2008 – 2013 di Kecamatan Koto Tangah, yaitu : (1) tidak datang ke tempat pemungutan suara ; dan (2) datang ke tempat pemungutan suara, tetapi tidak menggunakan hak suaranya secara benar. Sedangkan penyebab terjadinya perilaku non-voting di Kecamatan Koto Tangah berkaitan dengan empat faktor yaitu : (1) faktor psikologis ; (2) faktor sistem politik ; (3) faktor kepercayaan politik ; dan (4) faktor status sosial ekonomi.

Persetujuan Akhir Tesis

Nama Mahasiswa : **Aina.**
N I M : 107075

N a m a	Tanda Tangan	Tanggal
---------	--------------	---------

Prof. Dr. Azwar Ananda, MA.
Pembimbing I

Prof. Dr. Firman, MS.
Pembimbing II

Direktur Program Pasca Sarjana
Universitas Negeri Padang,

Ketua Program Studi/Konesentrasi,

Prof. Dr. Mukhaiyar
NIP. 19500612 197603 1 005.

Dr. Siti Fatimah, M. Pd., M. Hum.
NIP. 19610218 198403 2 001.

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, tesis dengan judul **“Perilaku Non-voting dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Padang Periode 2008 – 2013 (Studi Kasus di Kecamatan Koto Tengah)”**, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, penilaian, dan rumusan saya sendiri, tanpa bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Di dalam karya tulis ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali dikutip secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padang, Januari 2012.
Saya yang menyatakan,

A i n a.
NIM 10705.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadiran Allah Yang Maha Kuasa, pada akhirnya tesis yang berjudul *Perilaku Non-voting dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Padang Periode 2008 – 2013 (Studi Kasus di Kecamatan Koto Tangah)* ini dapat diselesaikan dengan baik. Tesis ini ditulis dan diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna mendapatkan gelar Magister Pendidikan (M.Pd.) Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dengan Konsentrasi Sejarah/Pendidikan Kewarganegaraan pada Program Pascasarjana Universitas Negeri Padang.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini banyak sekali sumbangan dan bantuan berbagai pihak, baik moril maupun materil. Atas semuanya itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Azwar Ananda, MA. Selaku Pembimbing I dan Dosen Program Pascasarjana Universitas Negeri Padang yang telah banyak memberikan motivasi, arahan, bimbingan, dan meluangkan waktunya sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan.
2. Bapak Prof. Dr. Firman, MS. Selaku Pembimbing II dan Dosen Program Pascasarjana Universitas Negeri Padang yang juga sangat memperhatikan dan memberikan arahan kritis kepada penulis untuk dapat menyusun tesis ini dengan baik.
3. Bapak/Ibu Tim Penguji yang memberikan saran dan kritikan demi perbaikan tesis ini.

4. Bapak Prof. Dr. Mukhaiyar selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Negeri Padang, Bapak Prof. Dr. Gusril selaku Asisten Direktur I dan Bapak Prof. Dr. Rusdinal selaku Asisten Direktur II, serta segenap staf/karyawan Program Pascasarjana Universitas Negeri Padang yang telah memberikan kemudahan dan fasilitas selama mengikuti pendidikan.
5. Bapak dan Ibu Dosen Program Pascasarjana Universitas Negeri Padang, khususnya pada Program Studi Pendidikan IPS atas ilmu dan pengetahuan yang diberikan selama mengikuti pendidikan.
6. Ucapan yang sama juga penulis sampaikan kepada teman-teman sejawat pada Jurusan Ilmu Sosial Politik FIS Universitas Negeri Padang yang telah memberikan motivasi dan juga kesempatan untuk mendiskusikan fokus kajian ini guna mengungkapkannya secara lebih dalam dan lebih baik.
7. Teristimewa rasa terimakasih ditujukan pada suami dan anak-anak tercinta yang senantiasa memberikan dukungan bagi keberhasilan dalam penyelesaian tudy ini.

Akhirnya penulis menyadari bahwa masih banyak kelemahan dan kekurangan serta keterbatasan yang ada dalam penulisan tesis ini. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan saran dan kritikan yang bersifat konstruktif dari semua pihak guna perbaikan dan kesempurnaan tesis ini. Mudah-mudahan tesis ini bermanfaat bagi pengembangan keilmuan di kemudian hari.

Padang, Januari 2012.

Penulis.

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK BAHASA INGGRIS	i
ABSTRAK BAHASA INDONESIA	ii
PERSETUJUAN AKHIR TESIS	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	viii
 BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
 BAB II : KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA KONSEPTUAL	9
A. Kajian Pustaka	9
1. Partisipasi Politik	9
2. Bentuk Perilaku Non-voting dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya	13
3. Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilu Kepala Daerah) Langsung sebagai Implementasi Demokrasi	25
B. Kerangka Konseptual	34
C. Penelitian yang Relevan	36
 BAB III : METODE PENELITIAN	38
A. Jenis Penelitian	38
B. Penjelasan Istilah	39
C. Lokasi Penelitian	39

D. Informan Penelitian	40
E. Teknik dan Alat Pengumpulan Data	40
F. Teknik Menguji Keabsahan Data	41
G. Teknik Analisis Data	42
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A. Temuan Umum	43
1. Kondisi Fisik/Letak Geografis	43
2. Penduduk dan Mata Pencarian	44
3. Pendidikan	45
4. Kondisi Sosial Politik dan Budaya	45
5. Karakteristik Informan Penelitian	49
B. Temuan Khusus	51
1. Bentuk Perilaku Non-voting dalam Pemilu Kepala Daerah Langsung Walikota dan Wakil Walikota Padang Periode 2008-2013 di Kecamatan Koto Tengah	52
2. Faktor Penyebab terjadinya Perilaku Non-voting di Kecamatan Koto Tengah	56
C. Pembahasan	71
BAB V : KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN	81
A. Kesimpulan	81
B. Implikasi	82
C. Saran	83
KEPUSTAKAAN	86
LAMPIRAN	89
Lampiran I Pedoman Wawancara	90
Lampiran II Dokumentasi Penelitian	92
Lampiran III Foto-foto Penelitian	100

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 : Jumlah Pemilih Tetap di Kota Padang yang Menggunakan Hak Pilih dan Tidak Menggunakan Hak Pilihnya dalam Pemilu Kada Walikota dan Wakil Walikota Padang Periode 2008-2013	5
Tabel 2 : Jumlah Pemilih Tetap di Kecamatan Koto Tengah yang Menggunakan Hak Pilih dan Tidak Menggunakan Hak Pilihnya dalam Pemilu Kada Walikota dan Wakil Walikota Padang Periode 2008-2013	6
Tabel 4 : Jumlah Pemilih dalam Pemilu Kada Langsung Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2008 Berdasarkan Kecamatan dan Jenis Kelamin	39
Tabel 5 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Kelurahan dalam Lingkup Kecamatan Koto Tengah	44
Tabel 6 : Distribusi Penduduk Kecamatan Koto Tengah Berdasarkan Tingkat Pendidikan	45
Tabel 7 : Rekapitulasi Pemilih Terdaftar, Menggunakan Hak pilih dan Tidak Menggunakan Hak Pilih dalam Pemilu Legislatif 2009 di Kota Padang	47
Tabel 8 : Rekapitulasi Pemilih yang Menggunakan Hak pilih dan Tidak Menggunakan Hak Pilih dalam Pemilu Kepala Daerah Walikota dan Wakil Walikota Padang Periode 2008 – 2013	48
Tabel 9 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Komisi Pemilu Kota Padang	49
Tabel 10 : Karakteristik Informan Penelitian	50
Tabel 11 : Bentuk Perilaku Non-voting Informan Penelitian	55
Tabel 12 : Penyebab Non-voting di Kecamatan Koto Tengah Ditinjau dari Faktor Psikologis dalam Pemilu Kepala Daerah Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang Periode 2008-2013	61

Tabel 13	: Penyebab Non-voting Di Kecamatan Koto Tangah Ditinjau dari Faktor Sistem Politik dalam Pemilu Kepala Daerah Walikota dan Wakil Walikota Padang Periode 2008-2013	65
Tabel 14	: Penyebab Non-voting Di Kecamatan Koto Tangah Ditinjau dari Faktor Kepercayaan Politik dalam Pemilu Kepala Daerah Walikota dan Wakil Walikota Padang Periode 2008-2013	67

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Salah satu perubahan yang mendasar dari format politik Indonesia pasca reformasi 21 Mei 1998 dalam hal pemilihan kepala daerah tidak lagi melalui pemilihan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) melainkan melalui pemilihan umum (pemilu) kepala daerah secara langsung. Melalui pemilu kepala daerah langsung diharapkan akan terpilih kepala daerah dari kandidat terbaik yang lebih kredibel, kapabel dan aspiratif sesuai dengan keinginan masyarakat. Joko Prihatmoko (2005) menjelaskan pemilu kepala daerah langsung memiliki beberapa segi positif, yaitu : (1) kepala daerah akan memiliki mandat dan legitimasi ; (2) pemilu kepala daerah langsung memberikan proses pendidikan politik bagi masyarakat terutama tentang peran debat publik, sistem seleksi calon, visi dan misi, kebijakan, perencanaan dan anggaran dalam suatu sistem demokrasi ; (3) terjadinya *political equality* atau kesetaraan politik terutama dalam hal pemberian suara, proses pembuatan kebijakan maupun dalam melakukan implementasi dan evaluasi kebijakan ; (4) terdapatnya akuntabilitas publik karena pemilu kepala daerah secara langsung lebih *accessible* terhadap penduduk setempat karena kepala daerah yang terpilih akan lebih bertanggung jawab terhadap kebijakan-kebijakan dan hasilnya ; dan (5) pemilu kepala daerah langsung dapat meningkatkan kepekaan elit terhadap kebutuhan masyarakat dan bagaimana kebutuhan itu dapat dipenuhi dengan cara-cara yang efektif. Tujuan utama pemilu kepala daerah langsung adalah penguatan masyarakat dalam

rangka peningkatan kapasitas demokrasi lokal. Di sisi lain, pemilu kepala daerah langsung memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mewujudkan prinsip kedaulatan rakyat, karena kepala daerah dipilih oleh rakyat daerah itu sendiri. Dalam merealisasikan prinsip kedaulatan rakyat, pemilu kepala daerah harus dilaksanakan secara demokratis, tanpa ada pengaruh dari pihak-pihak tertentu yang membuat pemilih tidak bebas menyalurkan aspirasi dan menentukan pilihan sesuai dengan keinginannya. Penyaluran aspirasi rakyat melalui tindakan memilih dalam pemilu kepala daerah juga merupakan salah satu alat untuk mengukur tingkat partisipasi masyarakat. Miriam Budiardjo (1996) menjelaskan bahwa :

“dalam negara demokratis pemikiran yang mendasari konsep partisipasi politik ialah bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat, yang dilaksanakan melalui kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan-tujuan serta masa depan masyarakat dan untuk menentukan orang-orang yang akan memegang tampuk pimpinan.”

Dengan demikian kedaulatan rakyat yang terwujud dalam bentuk partisipasi politik merupakan suatu hal yang sangat fundamental dalam suatu negara demokratis. Ia memiliki makna yang sangat penting dalam bergeraknya roda sistem demokrasi. Apabila masyarakat memiliki tingkat partisipasi yang tinggi baik secara kualitas dan kuantitas, maka proses pembangunan politik akan berjalan secara optimal. Oleh karenanya tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu termasuk pemilu kepala daerah merupakan hal yang sangat penting, karena rendah atau tingginya suatu partisipasi menjadi indikator penting terhadap jalannya proses demokrasi sebagai pengejawantahan kedaulatan rakyat di tingkat lokal.

Pemilu kepala daerah langsung Walikota dan Wakil Walikota Padang yang diselenggarakan tanggal 23 Oktober 2008 merupakan sarana untuk mewujudkan aspirasi masyarakat di tingkat lokal. Pemilu kepala daerah ini merupakan momen yang berarti bagi masyarakat Kota Padang karena pertama kalinya masyarakat memilih secara langsung kandidat yang diinginkannya untuk mengisi jabatan tersebut. Disamping itu perubahan kedua UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No.12 tahun 2008 memberikan peluang bagi kandidat dari luar partai yang dikenal dengan calon independen sebagai calon alternatif. Ketentuan ini idealnya semakin mendorong masyarakat memilih untuk menggunakan hak suaranya saat pemilu kepala daerah berlangsung. Namun kenyataannya tingkat kehadiran masyarakat (*voting turn out*) dalam pemilu kepala daerah ternyata hanya menunjukkan angka 51%, jauh lebih rendah dibandingkan pemilu legislatif 2009 sebesar 63,54% dan pemilu presiden yang tingkat kehadiran pemilihnya 62,35%. Dari persentase kehadiran pemilih tersebut terlihat kecenderungan orang untuk tidak memilih (*golput*) terlihat semakin menguat.

Di Indonesia orang yang tidak ikut berpartisipasi dalam pemilu (orang yang memilih untuk berperilaku tidak memilih atau *non-voting*) disebut dengan istilah golongan putih (*golput*). Istilah *golput* muncul pada tahun 1970-an yang mengacu pada sikap dan tindakan untuk tidak berpartisipasi dalam pemilu Orde Baru karena dinilai tidak demokratis yaitu dengan cara tetap datang ke tempat pemungutan suara (TPS) tetapi menusuk lebih dari satu tanda gambar atau menusuk bagian putih dari kartu suara. Mungkin karena cara menusuk bagian putih inilah akhirnya mereka yang tidak berpartisipasi dalam pemilu

disebut golput (Arbi Sanit, 1992). Perilaku non-voting pada umumnya dimanifestasikan dalam berbagai bentuk. Terdapat empat bentuk perilaku non-voting menurut Sri Yanuarti (2009) yaitu : *Pertama*, orang yang tidak menghadiri tempat pemungutan suara sebagai aksi protes terhadap pelaksanaan pemilu dan sistem politik yang ada. *Kedua*, orang yang menghadiri tempat pemungutan suara namun tidak menggunakan hak pilihnya secara benar dengan menusuk lebih dari satu tanda gambar. *Ketiga*, orang yang menggunakan hak pilihnya dengan jalan menusuk bagian putih dari kartu suara. Dalam konteks semacam ini perilaku *non-voting* adalah refleksi protes atas ketidakpuasan terhadap sistem politik yang sedang berjalan. *Keempat*, orang yang tidak hadir di tempat pemungutan suara dikarenakan mereka memang tidak terdaftar sehingga tidak memiliki hak suara.

Realitas dan fenomena menguatnya golput pada pemilu-pemilu pasca reformasi termasuk pemilu kepala daerah langsung merupakan hal yang sangat memprihatinkan. Timbul pertanyaan mengapa suara rakyat menjadi demikian penting? *Pertama*, sebagai pelaksanaan asas kedaulatan rakyat. Dalam suatu proses pemilihan, terkandung hakikat bahwa rakyat menyerahkan hak demokrasiya kepada wakil yang mereka pilih. Disinilah terletak paham kedaulatan rakyat dimana rakyat berhak menentukan siapa yang mereka pilih dan membentuk kontrak politik antara mereka dengan wakil yang dipilihnya. Oleh sebab itu paham kedaulatan rakyat secara asasi mengakui persamaan hak tanpa membedakan baik atas dasar ekonomi, keturunan, pandangan politik atau keyakinan yang dianut. *Kedua*, tinggi rendahnya penggunaan hak pilih rakyat dalam pemilu menunjukkan kualitas partisipasi politik warga negara.

Ketiga, penggunaan hak politik yang maksimal dapat menghasilkan keabsahan (legitimasi) yang kuat bagi pemerintah terpilih. Dalam suatu negara demokrasi dukungan berupa keabsahan adalah prasyarat mutlak terselenggaranya pemerintah yang baik (Al Rafni, 2009).

Terkait dengan penggunaan hak pilih dalam pemilu kepala daerah langsung dari Walikota dan Wakil Walikota Padang Periode 2008-2013, data yang ada menunjukkan bahwa sejumlah 43,20% pemilih yang terdaftar sebagai pemilih tetap ternyata tidak menggunakan hak pilihnya (KPUD Kota Padang, 2008). Kondisi ini sebuah hal yang ironis apabila dikaitkan dengan upaya menumbuhkembangkan demokrasi di tingkat lokal, dimana masyarakat secara langsung dapat menentukan kandidat yang diinginkannya sebagai kepala daerah yang notabene adalah penguasa sekaligus sebagai penentu arah kebijakan. Untuk lebih jelasnya tabel 1 akan memberikan gambaran lengkap terkait dengan penggunaan hak pilih tersebut dalam pemilu kepala daerah langsung Walikota dan Wakil Walikota Periode 2008-2013.

Tabel 1 :
Jumlah Pemilih Tetap di Kota Padang
yang Menggunakan Hak Pilih dan Tidak Menggunakan Hak Pilihnya
dalam Pemilu Kepala daerah Walikota dan Wakil Walikota Padang
Periode 2008-2013.

No.	Kategori.	Jumlah Pemilih		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Jumlah pemilih tetap yang menggunakan hak pilih.	137.159	170.062	307.221
2.	Jumlah pemilih tetap yang tidak menggunakan hak pilih.	126.336	105.651	231.987
Jumlah Total		263.495	275.713	539.208

Sumber : KPUD Kota Padang (2008).

Selanjutnya di Kecamatan Koto Tangah yang menjadi lokasi penelitian ini, fenomena yang sama juga terjadi. Data yang dihimpun pada tabel 2 menunjukkan hal tersebut.

Tabel 2:
Jumlah Pemilih Tetap di Kecamatan Koto Tangah
yang Menggunakan Hak Pilih dan Tidak Menggunakan Hak Pilihnya
dalam Pemilu Kepala daerah Walikota dan Wakil Walikota Padang
Periode 2008-2013.

No.	Kategori.	Jumlah Pemilih		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Jumlah pemilih tetap yang menggunakan hak pilih.	26.657	32.518	59.175
2.	Jumlah pemilih tetap dalam DPT yang tidak menggunakan hak pilih.	24.076	19.690	43.766
Jumlah Total		50.733	52.208	102.941

Sumber : KPUD Kota Padang (2008).

Tabel 2 sebelumnya memberikan data faktual bahwa pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya di Kecamatan Koto Tangah dalam pemilu kepala daerah Walikota dan Wakil Walikota Padang yaitu sebesar 42,51%. Banyaknya masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang tahun 2008 di Kecamatan Koto Tangah ternyata juga terjadi pada pemilu legislatif 2009 yaitu sebesar 39,13%. Dengan kata lain di kecamatan ini tingkat ketidakhadiran masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya merupakan yang tertinggi di Kota Padang pada dua pemilu tersebut (KPUD Kota Padang, 2008). Disamping data di atas, Kecamatan Koto Tangah dikatakan sebagai kecamatan tertinggi tingkat ketidakhadiran masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya terungkap melalui tabel 3 berikut ini.

Tabel 3
Rekapitulasi Pemilih yang Menggunakan Hak pilih
dan Tidak Menggunakan Hak Pilih dalam Pemilu Kepala Daerah
Walikota dan Wakil Walikota Padang Periode 2008 – 2013.

No.	Kecamatan	Jumlah Pemilih yang Menggunakan Hak pilih	Jumlah Pemilih yang Tidak Menggunakan Hak Pilih.
1.	Padang Barat.	19.907	16.801
2.	Padang Utara.	20.650	23.025
3.	Koto Tangah.	59.175	43.766
4.	Nanggalo.	20.759	16.097
5.	Kuranji.	46.823	35.169
6.	Pauh.	19.166	16.014
7.	Padang Timur.	30.233	21.428
8.	Padang Selatan.	23.047	16.870
9.	Bungus Teluk Kabung.	9.753	4.475
10.	Lubuk Kilangan.	40.884	25.134
11.	Lubuk Begalung.	17.634	13.208
Jumlah Total		307.221	231.987

Sumber : KPU Kota Padang, 2009.

Tingkat kehadiran pemilih (*voting turn out*) di atas bila dibandingkan dengan rata-rata yang terjadi di negara-negara demokratis di seluruh dunia yaitu 64% masih di bawah angka rata-rata. Sejalan dengan hasil penelitian Lipset bahwa berdasarkan data pemilu di Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa Barat seperti Jerman, Swedia, Norwegia, serta Finlandia dimana masyarakat kota memiliki tingkat partisipasi politik yang lebih tinggi dibandingkan masyarakat desa (Miriam Budiardjo, 1998).

Berangkat dari pemaparan sebelumnya menarik dilakukan penelitian tentang penyebab perilaku *non-voting* dalam pemilihan kepala daerah langsung Walikota dan Wakil Walikota Padang Periode 2008-2013 di Kecamatan Koto Tangah.

B. Fokus Penelitian.

Penelitian ini difokuskan kepada hal sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk perilaku non-voting dalam pemilu kepala daerah langsung Walikota dan Wakil Walikota Padang periode 2008-2013 di Kecamatan Koto Tengah?
2. Bagaimana latar belakang terjadinya perilaku non-voting dalam pemilu kepala daerah langsung Walikota dan Wakil Walikota Padang periode 2008-2013 di Kecamatan Koto Tengah ditinjau dari faktor psikologis, faktor sistem politik, faktor kepercayaan politik, dan faktor status sosial ekonomi?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.

1. Tujuan Penelitian.

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan :

- a. Bentuk perilaku non-voting dalam pemilu kepala daerah langsung Walikota dan Wakil Walikota Padang periode 2008-2013 di Kecamatan Koto Tengah.
- b. Latar belakang terjadinya perilaku non-voting dalam pemilu kepala daerah langsung Walikota dan Wakil Walikota Padang periode 2008-2013 di Kecamatan Koto Tengah ditinjau dari faktor psikologis, faktor sistem politik, faktor kepercayaan politik, dan faktor status sosial ekonomi

2. Manfaat Penelitian.

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Manfaat teoritis, memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu politik, khususnya yang berkaitan dengan persoalan golput (*non voter*).
- b. Manfaat praktis, memberikan input bagi KPUD Kota Padang dalam meminimalisir jumlah non-voting dalam pemilu, baik pemilu legislatif, pemilu presiden, maupun pemilu kepala daerah.

BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

A. Kesimpulan.

Berdasarkan temuan penelitian tentang penyebab perilaku non-voting di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang dalam pemilu kepala daerah langsung Walikota dan Wakil Walikota Padang periode 2008 – 2013 dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Terdapat dua bentuk perilaku non-voting dalam pemilu kepala daerah Walikota dan Wakil Walikota Padang Periode 2008 – 2013 di Kecamatan Koto Tangah, yaitu : (1) tidak datang ke tempat pemungutan suara ; dan (2) datang ke tempat pemungutan suara, tetapi tidak menggunakan hak suaranya secara benar.
2. Terdapat empat faktor penyebab terjadinya perilaku non-voting dalam pemilu kepala daerah Walikota dan Wakil Walikota Padang Periode 2008 – 2013 di Kecamatan Koto Tangah, yaitu : (1) faktor psikologis ; (2) faktor sistem politik ; (3) faktor kepercayaan politik ; dan (4) faktor status sosial ekonomi. Ditinjau dari faktor psikologis, orientasi kepribadian non-voter cenderung apatis dan anomi terhadap kehidupan politik namun ciri kepribadian tidak otoriter dan toleran. Selanjutnya ditinjau dari faktor sistem politik, ternyata perilaku non-voting terjadi didorong oleh ketidakpuasan non-voter terhadap kinerja pemerintah, yang menurut mereka tidak membawa perubahan apa-apa terutama yang berkaitan langsung dengan kehidupan mereka. Sementara itu ditinjau dari faktor kepercayaan politik,

sebahagian besar non-voter tidak percaya bahkan ada yang tidak percaya sama sekali terhadap proses dan hasil penyelenggaraan pemilu kepala daerah. Sedangkan apabila ditinjau dari faktor latar belakang status sosial ekonomi, non-voter sebahagian besar adalah kalangan terdidik. Disamping itu pekerjaan dan penghasilan yang diperoleh turut menjadi penyebab perilaku non-voting.

B. Implikasi.

Adapun implikasi dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Angka non-voter (golput) yang cenderung meningkat pada setiap pemilu legislatif, pemilu presiden, maupun pemilu kepala daerah berimplikasi negatif terhadap kualitas demokrasi diantaranya masalah legitimasi kepala daerah terpilih. Oleh sebab itu diperlukan peningkatan kesadaran bagi pemilih untuk menghargai hak pilihnya sehingga hasil pemilu dapat lebih *legitimate*.
2. Besarnya angka non-voter dalam pelaksanaan pemilu legislatif, pemilu presiden, maupun pemilu kepala daerah tidak boleh dibiarkan berlangsung terus, karena hal ini dapat mendorong terjadinya krisis kepercayaan politik terhadap pemerintah. Oleh karena itu pemerintah maupun para politisi yang menjadi wakil rakyat di lembaga legislatif harus meningkatkan akuntabilitas serta kinerjanya guna membangun kredibilitasnya di mata masyarakat.
3. Perilaku non-voting dapat dikatakan sebagai bentuk perlawanan politik terhadap penguasa dan sangat potensial menjadi ancaman terhadap berjalannya proses demokrasi yang baik terutama dalam hal penyelenggaraan pemilu. Oleh karena itu pemerintah dan partai politik harus

menunjukkan komitmen politiknya yang tinggi untuk merealisasikan janji-janji politik yang dilontarkan pada saat kampanye. Apalagi apabila tidak direalisasikan, maka akan berakibat frustrasinya masyarakat sehingga memberi peluang muncul deprivasi relatif sebagaimana yang dikatakan oleh Ted Robert Gurr dalam bukunya *Why Men Rebel*. Kondisi ini akan berakibat terjadinya tindakan-tindakan destruktif yang mampu merusak sistem politik. Disamping itu komitmen yang tinggi dari pemerintah dan partai politik untuk merealisasikan isu kampanyenya akan menjadi penting guna mendorong tumbuhnya partisipasi politik.

C. Saran.

1. Mencermati data faktual dari kecenderungan meningkatnya jumlah golput dalam pemilu kepala daerah maupun pemilu legislatif, maka pemerintah, penyelenggara pemilu dan partai politik harus dapat menyusun agenda politik yang jelas, khususnya penyelenggaraan pendidikan politik yang terprogram kepada masyarakat agar hal ini dapat diminimalisir.
2. Besarnya jumlah non-voetpada hakikatnya merupakan sasaran potensial bagi partai politik untuk meraih dukungan politik di masa datang. Oleh karena itu seharusnya partai politik melalui kader-kadernya yang duduk di lembaga legislatif maupun eksekutif menunjukkan kinerja yang jelas serta memiliki komitmen yang tinggi untuk merealisasikan janji-janji yang dilontarkan saat kampanye. Dengan demikian peluang untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat terutama dukungan politik akan semakin terbuka.
3. Dengan semakin terbukanya ruang publik dalam hal informasi dan komunikasi yang berkontribusi terhadap kekritisn sikap pemilih dewasa

ini, maka seharusnya pemerintah dan semua aktor politik harus memiliki visi dan misi yang jelas dalam mengaktualisasikan berbagai program terutama program-program pembangunan yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat.

4. KPUD Kota Padang sebaiknya melakukan sosialisasi tahapan pelaksanaan pemilu kepala daerah secara lebih terprogram dan intensif terutama dalam menjangkau khalayak sasaran yang strategis agar dapat mengantisipasi terjadinya peningkatan jumlah non-voter.
5. KPUD Kota Padang sebaiknya melakukan kerjasama dengan berbagai elemen seperti perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat untuk menyelenggarakan *voter's education* (pendidikan pemilih) dengan tujuan memberikan pemahaman serta menumbuhkan kesadaran pada masyarakat pemilih terhadap penggunaan hak politiknya secara baik dan bertanggung jawab.
6. Pihak kelurahan sebaiknya melakukan pengecekan secara akurat terhadap Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan tujuan menghindari terjadinya masyarakat yang berhak memilih tidak menggunakan haknya saat pelaksanaan pemungutan suara. Apabila hal ini tidak dilakukan, maka dengan sendirinya akan tetap terjadi seperti apa yang selalu dikritik masyarakat, bahwa mereka tidak diberikan hak untuk memilih. Tentunya hal ini akan mendorong terjadinya non-voter secara administratif.
7. Tokoh masyarakat sebaiknya tidak bersikap pasif, tetapi hendaknya mendorong para pemilih untuk menggunakan hak politiknya secara baik terutama dalam hal pemberian suara saat pelaksanaan pemilu kepala daerah

sehingga memberi kemungkinan bagi terpilihnya kepala daerah yang kredibel dan memiliki legitimasi yang kuat.

KEPUSTAKAAN

A. Buku Teks dan Laporan Penelitian dan Makalah.

- Afan Gaffar. (1999). *Politik Indonesia : Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Arbi Sanit. (1992). *Aneka Pandangan Fenomena Golput*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Al Rafni, dkk. (2009). *Desentralisasi Politik : Kajian Tentang Pemilihan Kepala Daerah Langsung di Sumatera Barat*. Laporan Penelitian Strategis Nasional – Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang.
- Budi Payitno (1991). *What is Democracy?* Terjemahan. Jakarta : United States Information Agency.
- Croissant, Aurel (et.al). (2003). *Politik Pemilu di Asia Tenggara dan Asia Timur*. Jakarta : Pensil-324 dan Friedrich Ebert Stiftung.
- Czudnowski, Moshe. “Political Recruitment” dalam Fred I. Greenstein & Nelson Polsby. (1975). *Handbook of Political Science Vol.2*.
- Damsar. (2010). *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Greenstein, Fred I (ed.). (1975). *Handbook of Political Science Vol.4*. Massachusetts : Addison-Wesley Publishing Company.
- Hoogerwerff. (1985). *Politikologi :Pengertian dan Problem-problemnya*. Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Huntington, Samuel P. & Joan M. Nelson. (1976). *No Easy Choise : Political Participation in Developing Countries*. Massachusetts : Harvard University Press.
- Indria Samego. (1998). *Pemilu dan Demokrasi*. Jakarta : LIPI.
- Joko J. Prihatmoko. (2005). *Pemilihan Kepala Daerah Langsung : Filosofi, Sistem dan Problema Penerapan di Indonesia*. Yogyakarta : Lembaga Penelitian Pengembangan dan Pengabdian Masyarakat (LP3M) Universitas Wahid Hasyim dan Pustaka pelajar.
- Kato, Tsuyoshi, terjemahan Azizah Kasim. (1989). *Nasib Ibu dan merantau*. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Lexy J. Moleong (1998). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- M. Asfar. (1998). *Perilaku Nonvoting di Bawah Sistem Kepartaian Hegemonik*. Tesis S2 – Pascasarjana Universitas Gadjahmada Yogyakarta.
- Masri Singarimbun (editor). (1989). *Metode Penelitian Survei*. Jakarta : LP3ES.
- Mufti Mubarak. (2005). *Sukses Pilkada*. Surabaya : PT. Java Pustaka Media Utama.